

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa Kontestasi otoritas keagamaan antara NU dan Salafi di Pamekasan berlangsung dalam struktur sosial-keagamaan yang sedang bergeser. NU tetap menjadi otoritas dominan secara historis dan kultural, tetapi posisinya tidak lagi tunggal. Salafi hadir dengan strategi dakwah yang lebih terstruktur, penggunaan media digital, penguasaan wacana dalil, dan penetrasi ke masjid-masjid strategis di wilayah perkotaan. Kontestasi tidak terjadi sebagai konflik terbuka, tetapi sebagai perebutan legitimasi otoritatif melalui praktik wacana, habitus keagamaan baru, dan perebutan arena masjid sebagai sumber kapital simbolik. Temuan ini memperlihatkan bahwa otoritas keagamaan di Pamekasan kini bersifat lebih *plural*, *kompetitif*, dan ditentukan oleh kemampuan aktor mengonversi modal sosial, budaya, dan simbolik menjadi klaim otoritas yang sah.

Transformasi identitas masyarakat Islam khususnya pemuda terjadi sebagai respons atas perubahan struktur otoritas tersebut. Pemuda menghadapi berbagai rujukan identitas keagamaan yang saling bersaing, sehingga proses eksplorasi (*exploration*) dan komitmen (*commitment*) sebagaimana dijelaskan Marcia berjalan lebih intens. Mobilitas sosial dan digital membuka akses terhadap varian identitas keagamaan puritan, modernis, dan tradisional, memicu pergeseran dari identitas keagamaan yang diwariskan menuju identitas yang dipilih secara aktif. Di titik ini, terlihat dinamika sakralisasi identitas (*Mol*), di mana objektifikasi, komitmen emosional, ritual, dan narasi digunakan pemuda untuk meneguhkan identitas baru yang dianggap lebih autentik, rasional, atau sesuai aspirasi moral mereka. Transformasi identitas ini tidak seragam: sebagian pemuda bergerak menuju identitas puritan, sebagian mengalami moratorium berkepanjangan, dan sebagian tetap pada identitas tradisional dengan intensitas komitmen yang diperbarui.

Kontestasi otoritas dan transformasi identitas terbukti saling terkait dalam pola hubungan yang bersifat timbal balik. Kontestasi antara NU dan Salafi menciptakan ekosistem wacana, praktik, dan simbol yang memaksa pemuda menegosiasikan ulang identitas keagamaan mereka; sementara pilihan identitas pemuda pada gilirannya memperkuat atau melemahkan klaim otoritas kelompok tertentu. Arena masjid sebagai titik kontestasi menunjukkan bagaimana perebutan kapital simbolik berpengaruh langsung pada orientasi identitas jamaah, terutama pemuda yang berada pada fase pencarian diri. Dengan demikian, dinamika keagamaan Pamekasan tidak dapat dipahami hanya sebagai pertarungan antarotoritas, tetapi sebagai proses lebih luas dari pembentukan subjek keagamaan baru yang bergerak dalam lanskap otoritas yang semakin terfragmentasi dan terbuka.

B. IMPLIKASI TEORITIS DAN PRAKTIS

1. Implikasi teoritis

Penelitian ini menawarkan kontribusi teoretis yang signifikan terhadap studi tentang otoritas keagamaan dan perubahan sosial dalam Islam kontemporer Indonesia, khususnya melalui tiga implikasi utama: pembaruan konsep otoritas keagamaan dalam konteks digital, perluasan teori medan keagamaan ke dalam studi lokal, dan penguatan argumentasi mengenai multifragmentasi identitas Islam di level akar rumput.

Pertama, penelitian ini memperluas pemahaman tentang otoritas keagamaan dalam konteks abad ke-21. Teori klasik tentang otoritas dalam Islam, yang umumnya bertumpu pada hubungan sanad, posisi informal ulama, atau legitimasi institusional, mengalami tekanan serius dengan masuknya media digital sebagai sumber otoritatif baru. Temuan ini mendukung sekaligus menguji ulang kategori otoritas keagamaan yang dikemukakan oleh Dale F. Eickelman dan James Piscatori, yang menyebut bahwa “marketplace of ideas” Islam kini diperluas melalui teknologi komunikatif modern. Dalam konteks Pamekasan, otoritas tradisional NU tidak runtuh, tetapi tergeser dan tersaingi oleh otoritas berbasis “sanad teks

digital”, di mana keabsahan ditentukan oleh kedekatan dengan sumber awal Islam dan bukan oleh relasi sosial lokal. Teori otoritas dalam Islam karenanya perlu menambahkan dimensi digital sebagai agen sekaligus medan kontestasi.

Kedua, penelitian ini mengembangkan penggunaan teori medan Pierre Bourdieu dalam studi keislaman lokal. Selama ini, teori medan banyak dipakai untuk memetakan praktik keagamaan dalam kerangka makro, terutama dalam kajian Islam global atau nasional. Namun penelitian ini menunjukkan bahwa medan keagamaan juga terbentuk dan bergerak secara kompleks di wilayah-wilayah yang tampak homogen secara sosial seperti Pamekasan. Masjid, pesantren, media sosial, dan pengajian bukan hanya arena simbolik, tetapi menjadi tempat penawaran dan pertarungan modal budaya, simbolik, dan sosial. Dalam hal ini, teori medan berhasil menjelaskan mengapa kelompok Salafi dengan modal transnasional mampu menembus struktur sosial NU, yang banyak bergantung pada modal sosial lokal. Kontribusi ini memperlihatkan bahwa kategori modal dalam teori Bourdieu tidak statis, tetapi bersifat kontekstual dan bisa berubah bergantung pada akses teknologi dan jaringan global.

Ketiga, analisis tentang multifragmentasi identitas Islam menegaskan bahwa identitas keagamaan tidak bisa lagi dipahami melalui model dikotomis misalnya antara tradisional dan modernis, moderat dan radikal, elit dan akar rumput. Temuan menunjukkan bahwa pemuda NU bisa mengadopsi struktur epistemik Salafi, sementara sebagian pengikut Salafi tetap mempraktikkan tradisi kultural yang dilabeli “bid’ah” oleh doktrin resmi mereka. Fenomena ini menegaskan gagasan bahwa identitas keagamaan bersifat cair, adaptif, dan tidak monolitik. Dengan kata lain, dinamika Islam di Pamekasan memperlihatkan bahwa fragmentasi bukan hanya terjadi antar kelompok, tetapi juga secara internal dalam diri individu-individu yang hidup di tengah transisi budaya dan tekanan globalisasi.

Secara keseluruhan, implikasi teoretis dari penelitian ini membuka ruang baru bagi pengembangan studi keislaman kontekstual dengan

memperhatikan peran teknologi, dinamika sosial kultural, dan konstruksi otoritas yang terus berkembang. Ini bukan sekadar studi kasus lokal, tetapi titik masuk untuk mengembangkan teori keagamaan yang relevan dengan era digital dan pascamodern. Penelitian ini mengusulkan bahwa otoritas, identitas, dan praktik keagamaan tidak lagi bisa dipahami dengan kerangka lama yang mengabaikan jaringan digital dan transformasi habitus pemuda. Sebaliknya, perlu ada sintesis antara teori sosial klasik dan analisis media baru untuk membaca fenomena keislaman kontemporer secara utuh.

2. Implikasi Praktis

a. Penguatan kapasitas otoritas lokal NU dalam menghadapi penetrasi wacana keagamaan baru.

Temuan menunjukkan bahwa NU kehilangan sebagian modal simbolik akibat perubahan pola konsumsi keagamaan masyarakat dan meningkatnya otoritas berbasis dalil digital. Secara praktis, NU perlu memperbarui mekanisme kaderisasi, memperkuat literasi keagamaan berbasis sanad, serta melakukan reposisi dakwah yang sesuai dengan pola rasionalitas generasi muda. Penguatan kemampuan komunikasi digital, pembaharuan metode pengajian, dan keterlibatan kiai muda sebagai jembatan generasi dapat memulihkan daya tawar otoritas tradisional dalam lanskap otoritas yang berubah.

b. Pengelolaan masjid sebagai ruang publik keagamaan yang inklusif dan tidak terpolarisasi.

Karena masjid terbukti menjadi arena kontestasi paling intens antara NU dan Salafi, diperlukan standar tata kelola masjid yang lebih jelas, akuntabel, dan transparan. Pemerintah daerah, takmir, dan jejaring ormas Islam perlu merancang pedoman pengelolaan kegiatan ceramah dan pengisi pengajian untuk mencegah perebutan struktural yang dapat memicu ketegangan sosial. Regulasi yang menegaskan fungsi masjid sebagai ruang bersama bukan milik kelompok tertentu akan meredam polarisasi sekaligus menjaga kohesi sosial masyarakat Madura.

c. Penguatan literasi keagamaan digital bagi pemuda untuk meminimalkan radikalisasi simbolik dan konflik identitas.

Transformasi identitas pemuda yang dipicu konsumsi wacana digital memunculkan fenomena “loncatan identitas” tanpa proses dialog dengan lingkungan sosialnya. Praktisnya, institusi pendidikan, pesantren, komunitas remaja masjid, dan organisasi kepemudaan perlu mengembangkan literasi digital keagamaan: kemampuan memahami otoritas keilmuan, menilai kredibilitas dalil, membedakan pandangan fikih, dan membaca konteks keagamaan. Upaya ini bukan untuk membendung pilihan identitas, tetapi untuk memastikan proses eksplorasi identitas berlangsung sehat, rasional, dan tidak memutus hubungan sosial dengan keluarga atau komunitas.

d. Intervensi pada level keluarga sebagai ruang negosiasi identitas yang paling rentan.

Data menunjukkan bahwa keluarga menjadi titik gesekan utama antara tradisionalisme dan puritanisme. Program penguatan komunikasi keluarga, dialog antar-generasi, dan pelatihan manajemen konflik berbasis nilai keagamaan lokal dapat membantu keluarga menghadapi perubahan orientasi keagamaan anak-anaknya tanpa menimbulkan konflik laten. Intervensi ini penting untuk menjaga kohesi sosial di tingkat mikro.

e. Penguatan riset kebijakan tentang dinamika otoritas dan identitas keagamaan di daerah plural secara internal.

Kasus Pamekasan membuktikan bahwa polarisasi keagamaan tidak hanya terjadi antara agama, tetapi juga intra-Islam. Pemerintah daerah, Kementerian Agama, dan lembaga penelitian dapat menggunakan hasil disertasi ini untuk merancang kebijakan moderasi beragama yang berbasis data, bukan asumsi. Termasuk: pemetaan aktor, pola kontestasi masjid, dan dinamika identitas pemuda. Basis kebijakan yang empirik akan lebih relevan dan efektif dalam menjaga harmoni sosial.

C. SARAN-SARAN

1. Nahdlatul Ulama (NU): Penguatan Otoritas, Literasi, dan Ruang

Keterlibatan Pemuda

- a. Membangun kembali basis otoritas melalui literasi keagamaan yang terstruktur. Salah satu temuan penting penelitian ini adalah melemahnya otoritas keagamaan NU di mata sebagian pemuda karena absennya sistem literasi keagamaan yang rapi dan berkelanjutan di tingkat masjid. NU perlu mengembangkan model kajian terstruktur “mirip halaqah” yang tetap berakar pada tradisi namun menyajikan argumen yang sistematis, evidensial, dan adaptif terhadap kebutuhan pemuda kota.
- b. Menata kembali masjid berbasis kaderisasi, bukan sekadar administratif. Struktur takmir yang lebih berfungsi administratif dibanding intelektual menyebabkan banyak masjid NU mudah ditembus dakwah Salafi. NU perlu menata ulang mekanisme takmir berbasis kompetensi keagamaan minimal, modul khutbah yang distandardisasi, dan mekanisme rotasi penceramah agar masjid benar-benar menjadi ruang sakral komunitas, bukan ruang kosong.
- c. Membuka ruang dialog sehat dengan pemuda yang sedang “moratorium identitas”. Pemuda NU tidak sedang “berpindah” begitu saja; mereka sedang berproses. NU perlu menyediakan ruang aman untuk bertanya, berdiskusi, dan berdebat secara intelektual tentang tradisi, fikih, dan teologi, alih-alih mengontrol dengan pendekatan larangan sepihak yang justru mempercepat alienasi.

2. Kelompok Salafi: Praktik Dakwah yang Sensitif terhadap Kultur Lokal dan Stabilitas Sosial

- a. Sensitivitas budaya harus menjadi bagian dari strategi dakwah. Dalam banyak temuan, dakwah Salafi menimbulkan resistensi justru karena gaya penyampaiannya yang dianggap “menyerang” ritus lokal. Kelompok Salafi di Pamekasan perlu mengembangkan pendekatan

dakwah yang lebih memperhatikan konteks sosial-budaya Madura, tanpa harus kehilangan prinsip teologisnya.

- b. Membangun mekanisme resolusi konflik dengan takmir dan komunitas lokal. Alih-alih terus berada dalam ketegangan dengan NU, diperlukan forum komunikasi reguler antara ustaz Salafi, takmir masjid, dan tokoh masyarakat untuk mencegah eskalasi kecurigaan yang tidak perlu. Formalisasi forum semacam ini akan menjaga ruang publik keagamaan tetap sehat dan kondusif.
 - c. Menata ulang penggunaan media digital agar tidak memperkuat polarisasi. Konten digital yang berisi penilaian terhadap ibadah kelompok lain terbukti menjadi pemicu konflik. Salafi dapat mengalihkan fokus dakwah digital pada penguatan akhlak, ibadah personal, dan kajian tematik tanpa menyinggung praktik komunitas lain secara frontal.
3. Pemerintah Daerah dan Kemenag: Penguatan Moderasi dan Literasi Keagamaan Komunitas
- a. Membuat kebijakan relasi kelembagaan masjid yang lebih jelas dan berorientasi kolaborasi. Masjid menjadi titik panas kontestasi. Pemerintah daerah bersama Kemenag perlu memiliki pedoman arsitektur tata kelola masjid, terutama terkait mekanisme penetapan penceramah, standar minimal kompetensi dai, SOP penyelesaian konflik di tingkat masjid, pengawasan konten keagamaan yang berpotensi memecah belah. Pedoman tersebut bukan untuk membatasi otoritas umat, tetapi untuk mencegah konflik horizontal.
 - b. Program literasi keagamaan berbasis data lokal. Pemerintah harus membangun program penguatan kapasitas pemuda berbasis realitas konflik keagamaan Pamekasan: moderasi keagamaan yang tidak normatif, literasi digital keagamaan, dan pendidikan dialog lintas madzhab.
 - c. Memfasilitasi ruang publik lintas kelompok keagamaan. Dialog NU–Salafi di forum formal telah sulit tercapai. Pemerintah dapat memulai

dari kegiatan non-teologis: forum kepemudaan, kegiatan sosial, atau pelatihan wirausaha. Interaksi non-doktrinal sering menjadi pintu masuk untuk menurunkan tensi sektarian.

4. Akademisi dan Peneliti: Pengembangan Kajian Otoritas–Identitas di Tingkat Mikro
 - a. Perlu memperluas penelitian pada level mikro-komunitas. Penelitian ini menemukan dinamika kontestasi yang sangat khas di Pamekasan kota. Penelitian lanjutan bisa mengelaborasi bagaimana kontestasi dan transformasi identitas berlangsung di: desa agraris, komunitas santri pesantren, relasi antara alumni Timur Tengah dan pesantren lokal, ruang digital khusus remaja Madura.
 - b. Pengembangan model analisis tentang kontestasi otoritas berbasis masjid. Penelitian ke depan dapat mengembangkan model teoritis yang menggabungkan teori otoritas (Weiner, Bourdieu) dengan studi ruang keagamaan, terutama masjid sebagai arena simbolik, politik, dan kapital sosial.
 - c. Studi longitudinal tentang identitas keagamaan pemuda Madura. Transformasi identitas tidak selesai dalam satu fase. Diperlukan penelitian berjangka panjang untuk melihat apakah identitas puritan akan menetap, berubah, atau kembali melebur dengan budaya lokal Madura.
5. Komunitas dan Pemangku Masjid: Manajemen Masjid sebagai Ruang Aman Keagamaan
 - a. Masjid harus dikelola sebagai ruang aman, bukan arena perebutan. Takmir perlu memperkuat fungsi masjid sebagai ruang umum yang menjaga: inklusivitas jamaah, keharmonisan ritual, keteraturan aktivitas keagamaan. Konflik harus dikelola melalui dialog, bukan pengusiran mendadak atau konfrontasi terbuka.
 - b. Program pemberdayaan pemuda berbasis masjid. Pemuda mencari ruang signifikansi. Masjid yang gagal memberi ruang itu akan kehilangan generasi baru. Kegiatan seperti kelas kitab, mentoring

hafalan, pertemuan literasi, sampai kegiatan non-agama perlu dibuka untuk memikat minat pemuda tanpa kehilangan karakter keagamaan.

D. REKOMENDASI

Temuan disertasi ini menunjukkan bahwa kontestasi otoritas keagamaan di Pamekasan bukan sekadar perebutan pengaruh, tetapi melibatkan perubahan identitas yang mendalam pada tingkat individu dan komunitas. Karena itu, rekomendasi utama penelitian ini adalah:

- a. Menggeser pola interaksi dari konfrontatif menjadi dialogis, tanpa meniadakan perbedaan teologis.
- b. Mengembalikan masjid sebagai ruang publik bersama, bukan simbol dominasi kelompok.
- c. Memperkuat literasi keagamaan pemuda, karena mereka aktor paling rentan sekaligus paling strategis.
- d. Mengembangkan pendekatan keagamaan yang lebih reflektif, bukan sekadar normatif, sesuai dinamika masyarakat yang semakin tereduksi dan berorientasi pada dalil.
- e. Rekomendasi ini bersifat praktis sekaligus strategis, dan bisa diimplementasikan secara bertahap sesuai kapasitas masing-masing pemangku kepentingan.